

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI PENDIDIKAN DASAR: RESPONS GURU DAN IMPLIKASI BAGI PEMBELAJARAN

Uswatun Hasanah
PGMI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
uswatun_hasanah@uinsatu.ac.id,

ABSTRACT

Merdeka Belajar is a policy aimed at facilitating teachers in implementing online learning during the pandemic. This policy seeks to realize the essence of education, where students are granted the freedom to learn and to develop their competencies. The success of the Merdeka Belajar policy depends greatly on the roles of principals and teachers, as key actors in school-based education. When Merdeka Belajar is fully embraced by teachers, it will also be reflected in students. This study aims to explore teachers' responses to the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy. A descriptive quantitative method was used in this research, with a questionnaire distributed via Google Forms as the primary instrument. The respondents included 47 teachers from 11 primary-level schools. The data obtained were analyzed using single-tabulation and percentage techniques. The results of this study indicate that teachers understand the concept of Merdeka Belajar, agree with its implementation implications in schools, and believe that Merdeka Belajar-based teaching and assessment will enhance students' literacy and numeracy skills.

Keywords: primary education, merdeka belajar, implications, learning

ABSTRAK

Merdeka belajar merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemic. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan esensi pendidikan, dimana siswa diberikan kebebasan dalam belajar, dan dalam meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar tidak terlepas dari peran kepala sekolah dan guru, sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Jika merdeka belajar sudah ada pada diri guru, maka merdeka belajar akan ada pada diri siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif diskriptif. Instrumen yang digunakan berupa angket yang disebar melalui google form. Jumlah responden sebanyak 47 guru yang berasal dari 11 sekolah di jenjang pendidikan dasar. Data yang didapatkan dianalisis dengan teknik tabulasi tunggal dan persentase. Hasil dari penelitian ini menunjukkan guru telah memahami konsep merdeka belajar, guru setuju dengan diberlakukannya merdeka belajar di sekolah dan guru juga setuju bila pembelajaran serta asesmen yang berbasis merdeka belajar akan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Kata Kunci: respon guru, pendidikan dasar, merdeka belajar, implikasi, pembelajaran

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perubahan sector sosial, ekonomi, pariwisata dan pendidikan secara global (Lawrence & Wu, 2021). Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Dimana sejak virus Covid-19 ini secara massif tersebar di seluruh Indonesia, tempat-tempat pariwisata, tempat peribadatan, tempat perbelanjaan, dan bahkan sekolah harus ditutup untuk sementara waktu. Segala upaya ini dilakukan agar mata rantai penularan Covid-19 tidak semakin meluas. Ditutupnya sekolah, bukan berarti pembelajaran ditiadakan. Sebab pembelajaran harus terus dilaksanakan pada kondisi dan situasi apapun (Cahapay, 2020). Untuk itu, Menteri Pendidikan mengeluarkan suatu kebijakan yakni pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran jarak jauh ini, guru dan siswa tidak bertemu secara langsung, namun bertemu melalui platform-platform pembelajaran (Sakti, 2023) seperti WA, Google Classrom, Edmodo, Google Meet, Zoom Meeting dan lain sebagainya.

Pada awal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, muncul berbagai macam problematika (Fikri & Mariana, 2022). Ini adalah kondisi yang wajar, sebagai bentuk adaptif dari perubahan yang ada. Dari sudut pandang guru, pembelajaran daring menjadi sangat memberatkan. Palsalnya tidak semua guru memiliki kemampuan yang baik dalam bidang teknologi (Asmuni, 2020). Proses adaptasi guru dalam pembelajaran daring juga tidak sama, ada yang cepat ada juga yang memerlukan waktu penyesuaian lebih lama. Disamping itu, guru yang sudah terbiasa menyusun perencanaan, implementasi dan evaluasi secara langsung pada pembelajaran tatap muka, menjadi kesulitan jika diharuskan beralih pada sistem daring. Terlebih jika pembelajaran daring tidak didukung oleh orang tua, karena kesibukan orang tua dalam bekerja, maka pembelajaran daring tidak bisa berjalan maksimal (Fauzi & Sastra Khusuma, 2020). Namun situasi ini bersifat memaksa dan mendesak, sehingga mau atau tidak,

siap atau tidak, pembelajaran daring harus tetap dilaksanakan.

Bisa dibayangkan, apabila pembelajaran daring yang dilaksanakan tetap menggunakan cara belajar yang konvensional maka jelas akan menambah serentetan masalah yang ada. Guru memaksakan siswa untuk menguasai semua materi sesuai yang ada di buku. Guru menjelaskan dengan cara ceramah melalui zoom atau google meet, siswa mendengar namun belum memahami, saat guru memberikan tugas siswa tidak bisa mengerjakan tugas karena belum paham. Terlebih jika orang tua juga tidak paham dengan materi yang ada, maka pembelajaran justru hanya akan menjadi beban, beban siswa dan beban orang tua. Padahal, secara filosofis pembelajaran bukan berkaitan dengan seberapa banyak pengetahuan yang harus dikuasai siswa, namun seberapa besar pengetahuan dapat bermanfaat bagi kehidupannya (Nuryatno, 2015). Pendidikan juga bukanlah suatu beban sebab pendidikan merupakan proses untuk membentuk ilmu pengetahuann.

Melihat beragam problematika dalam pembelajaran daring, Menteri

Pendidikan kemudian mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemic (Thohir et al., 2021). Melalui kebijakan merdeka belajar, harapannya siswa bisa lebih mandiri dalam belajar (Susilo, dkk. 2022). Siswa bebas untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari, dan cara belajar apa yang paling mereka sukai. Siswa bisa belajar dari berbagai macam sumber. Bahkan lingkungan pun juga bisa menjadi sumber belajar, siswa bisa mengeksplorasi, menginvestigasi, melakukan eksperimen dan menanya tentang apapun yang ada di lingkungan mereka (Santín & Torruella, 2017).

Ada empat inisiatif dalam kebijakan merdeka belajar diantaranya menghapus ujian nasional dan menggantikannya dengan asesmen nasional, pelaksanaan asesmen nasional diserahkan pada sekolah, format RPP dibuat ringkas 1 halaman dan penghapusan sistem zonasi. Keempat inisiasi ini pada dasarnya adalah untuk meringankan beban guru dan

siswa, sehingga bisa mewujudkan kemerdekaan dalam belajar.

Perubahan kebijakan yang ada perlu direspon oleh pihak sekolah, sebab keberhasilan kebijakan merdeka belajar tidak terlepas dari peran kepala sekolah (Kastaji et al., 2024) dan guru sebagai factor utama dalam proses pembelajaran (Irsalulloh & Maunah, 2023). Sebagaimana yang dikatakan oleh Nadim Makarim, apabila merdeka belajar telah ada pada diri guru, maka merdeka belajar akan ada pada diri siswa. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mengetahui respon guru terhadap kebijakan kurikulum merdeka belajar. Ada beberapa hal yang ditelaah dalam respon tersebut diantaranya adalah tentang pemahaman guru terhadap kebijakan merdeka belajar dan opini guru terhadap kebijakan merdeka belajar.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif diskriptif. Metode kuantitatif diskriptif digunakan untuk menjelaskan respon guru di madrasah ibtidaiyah tentang kebijakan merdeka belajar. Populasi dari penelitian ini adalah guru di beberapa sekolah

jenjang pendidikan dasar Provinsi Jawa Timur. Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Setelah penentuan sampel kemudian peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrument angket berupa google form. Penyebaran angket dilakukan secara terbuka dengan total jumlah responden ada 47 guru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tabulasi tunggal dan prosentase. Komponen dalam angket tersebut berupa identitas, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman guru dan pendapat guru tentang kebijakan merdeka belajar. Data yang telah terkumpul kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram dan dianalisis secara diskriptif (Kurniati et al., 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemahaman Guru tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kebijakan merdeka belajar muncul sebagai respon pemerintah dalam menanggapi situasi belajar di

masa pandemic. Dimana pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka di kelas harus beralih pada pembelajaran secara daring. Hal ini memicu berbagai macam respon dari para guru. Data yang diperoleh melalui penyebaran angket menunjukkan bahwa sebanyak 15 sekolah yang menjadi sampel pada penelitian, ada 6 sekolah sudah menerapkan kebijakan merdeka belajar dan 9 sekolah belum menerapkannya. Respon guru tentang kebijakan merdeka belajar juga beragam. Respon tersebut peneliti klasifikasikan dalam 3 kategori. Pertama, berkenaan dengan pemahaman guru tentang kebijakan MBKM, kedua, respon guru tentang kebijakan MBKM secara umum. Ketiga, respon guru tentang kebijakan MBKM secara khusus berkaitan dengan proses pembelajaran dan penilaian. Dalam setiap kategori terdapat beberapa indicator yang tersaji dalam pernyataan-pernyataan. Setiap indicator tersebut, kemudian dihitung jumlah kemunculannya mengacu pada jawaban-jawaban responden. Jawaban responden dari

kategori pertama disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Pemahaman guru tentang kebijakan MBKM

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Saya sudah memahami konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Sangat Setuju	3 6,38%
		Setuju	35 74,47%
		Netral	6 12,77%
		Kurang Setuju	1 2,13%
		Tidak Setuju	2 4,26%
		Jumlah	47 100%
2	Saya sudah membaca tentang regulasi kebijakan MBKM	Sangat Setuju	2 4,26%
		Setuju	37 78,72%
		Netral	4 8,51%
		Kurang Setuju	0 0,00%
		Tidak Setuju	4 8,51%
		Jumlah	47 100%
3	Saya sudah memahami format modul ajar pada kebijakan MBKM	Sangat Setuju	2 4,26%
		Setuju	31 65,96%
		Netral	9 19,15%
		Kurang Setuju	1 2,13%
		Tidak Setuju	4 8,51%
		Jumlah	47 100%

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 74,47% guru mengaku telah memahami konsep kebijakan MBKM. Ditunjukkan dengan 78,72% guru telah membaca regulasi tentang MBKM dan sebanyak 65,96% guru telah memahami format RPP yang

digunakan dalam implementasi MBKM. Namun berkaitan dengan pemahaman guru tentang kebijakan sistem zonasi sebagian besar guru

menjawab netral, yakni sebesar 48,94%. Ini menunjukkan pemahaman guru tentang kebijakan MBKM belum secara keseluruhan, ada indikasi pada aspek-aspek tertentu saja yang dipahami oleh guru tentang kebijakan MBKM.

Pemahaman guru terhadap kebijakan MBKM menjadi factor utama suksesnya kebijakan tersebut. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani dkk. Bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kinerja kepala sekolah dan guru (Mulyani et al., 2020). Pemahaman tersebut berkaitan dengan empat inisiasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan pada kebijakan MBKM (Abidah et al., 2020). Termasuk di dalamnya tentang modul ajar, asesmen nasional, dan penghapusan ujian nasional.

2. Respon Guru tentang Kebijakan Merdeka Belajar

Secara praktis kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

diterima dengan baik oleh para guru. Sebagaimana hasil dari penyebaran kuesioner yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Respon Guru tentang Kebijakan Merdeka Belajar

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase	
1	Saya yakin bahwa kebijakan MBKM dapat memotivasi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya	Sangat Setuju	11	23,40%
		Setuju	32	68,09%
		Netral	4	8,51%
		Kurang Setuju	0	0,00%
		Tidak Setuju	0	0,00%
		Total	47	100%
2	Menurut saya kebijakan MBKM membuat tugas guru semakin ringan	Sangat Setuju	7	14,89%
		Setuju	25	53,19%
		Netral	11	23,40%
		Kurang Setuju	3	6,38%
		Tidak Setuju	1	2,13%
		Total	47	100%
3	Kebijakan MBKM cocok diimplementasikan di tempat saya mengajar	Sangat Setuju	3	6,38%
		Setuju	30	63,83%
		Netral	11	23,40%
		Kurang Setuju	1	2,13%
		Tidak Setuju	2	4,26%
		Total	47	100%

Data tersebut menunjukkan 68,09% guru setuju jika kebijakan merdeka belajar dapat memotivasi

peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Guru juga beranggapan bahwa melalui kebijakan merdeka belajar tugas-tugas guru yang berkaitan dengan hal administrative menjadi lebih ringan, sebagaimana data yang ada, sebanyak 53,19% guru setuju jika kebijakan MBKM membuat tugas guru menjadi lebih ringan. Sebanyak 63,83% guru juga sepakat jika kebijakan MBKM dapat diimplementasikan di instansi tempat para guru mengajar. Persentase tersebut selaras dengan teori bahwa kebijakan merdeka belajar merupakan salah satu upaya dalam mempermudah guru mengimplementasikan pembelajaran di masa pandemic (Thohir et al., 2021). Namun, pernyataan tentang sulitnya implementasi kebijakan MBKM sebanyak 42,55% responden memilih untuk netral dan sebanyak 38,30% menjawab tidak setuju. Respon ini menunjukkan optimisme guru dalam implementasi kebijakan MBKM.

Optimisme tersebut perlu ditunjang dengan sejumlah program yang dapat meningkatkan profesionalitas guru. Sebagaimana hasil dari penelitian terdahulu bahwa

kebijakan akan berjalan secara optimal jika diimplementasikannya kebijakan disertai dengan upaya pelatihan yang menunjang profesionalitas guru (Prasetyono et al., 2021).

3. Respon Guru tentang Kebijakan Merdeka Belajar terhadap Proses Pembelajaran dan Penilaian

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk memberdayakan potensi diri anak berbasis ilmu pengetahuan dan keagamaan (Arifin, 2019), agar anak menjadi manusia dan masyarakat yang selamat dan bahagi dalam hidupnya (Saputra et al., 2022). Kata kunci dari pendapat tersebut adalah potensi yang berbasis ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui kegiatan literasi dan sejumlah aktivitas belajar lainnya. Sehingga aktivitas belajar itupun juga harus terukur, agar dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam kebijakan MBKM salah satunya adalah menghapuskan ujian nasional dan menggantikan dengan asesmen nasional. Dimana dalam asesmen nasional terdapat asesmen untuk menilai ketercapaian kognitif peserta

didik yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum. Respon guru tentang proses pembelajaran dan asesmen nasional pada Kebijakan MBKM dipaparkan pada tabel 4.

Tabel 4. Respon Guru tentang Proses Pembelajaran dan Asesmen Nasional

No	Pernyataan	Jumlah	persentase
1	Asesmen nasional memudahkan guru dan sekolah dalam mengukur keberhasilan pembelajaran	Sangat Setuju	9 19,15%
		Setuju	31 65,96%
		Netral	7 14,89%
		Kurang Setuju	0 0,00%
		Tidak Setuju	0 0,00%
		Total	47 100%
2	Kebijakan MBKM akan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	Sangat Setuju	8 17,02%
		Setuju	32 68,09%
		Netral	6 12,77%
		Kurang Setuju	0 0,00%
		Tidak Setuju	1 2,13%
		Total	47 100%
3	Asesmen kompetensi minimum efektif untuk mengukur ketercapaian kompetensi kognitif peserta didik	Sangat Setuju	7 14,89%
		Setuju	27 57,45%
		Netral	12 25,53%
		Kurang Setuju	0 0,00%
		Tidak Setuju	1 2,13%
		Total	47 100%

Dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 57,45% guru setuju bahwa asesmen kompetensi minimum efektif

untuk mengukur ketercapaian kompetensi kognitif peserta didik. Berkaitan dengan asesmen nasional, sebanyak 65,96% guru setuju bahwa asesmen nasional memudahkan guru dan sekolah dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Selaras dengan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pemerintah memberikan otonomi pada sekolah untuk melaksanakan asesmen nasional dan berhak menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, penilain hasil belajar dilakukan oleh guru di masing-masing instansi pendidikan. Kedua, bahan ujian sekolah digunakan sebagai acuan kelulusan peserta didik (seperti tes tertulis, portofolio, penugasan, danf aiau bentuk kegiatan lain) (Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Cap, 2020). Melalui kebijakan ini pihak sekolah dan guru akan lebih mudha mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik

Keberhasilan penilaian tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Asesmen yang berbasis literasi dan numerasi juga perlu didukung dengan pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan

literasi dan numerasi peserta didik. Dari hasil penelitian menunjukkan sebanyak 68,09% guru setuju bahwa kebijakan MBKM akan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Hal ini selaras dengan salah tujuan MBKM bahwa dengan adanya MBKM diharapkan peserta didik mampu menguasai kemampuan literasi yang meliputi literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia (Yamin & Syahrir, 2020).

E. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa guru telah memahami konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dibuktikan dengan guru telah membaca regulasi MBKM, telah memahami penyederhanaan RPP, dan penghapusan sistem zonasi. Respon guru terhadap kebijakan MBKM, responden setuju bahwa kebijakan MBKM dapat memotivasi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya, meringankan tugas guru dan tidak sulit untuk diimplementasikan, namun memerlukan sejumlah pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Respon guru terhadap proses pembelajaran dan asesmen,

responden setuju bahwa merdeka belajar dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, asesmen nasional digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>
- Arifin, I. (2019). *Kepemimpinan Religio-Humanistik Bidang Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0. dan Society 5.0.*
- Asmuni, A. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Paedagogy*, 7(4), 281. <https://doi.org/10.33394/jp.v7i4.2941>
- Cahapay, M. B. (2020). The responsiveness of bachelor of elementary education curriculum: An illuminative evaluation. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(3), 743–750. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20649>
- Fauzi, I., & Sastra Khusuma, I. H. (2020). Teachers' Elementary School in Online Learning of COVID-19 Pandemic Conditions.

- Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1), 58–70.
<https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.914>
- Fikri, H. T., & Mariana, R. (2022). Technology Readiness dan Computer Self Efficacy pada Guru dalam Sistem Pembelajaran Daring. *Analitika*, 14(1), 47–58.
<https://doi.org/10.31289/analitika.v14i1.6015>
- Irsalulloh, D. B., & Maunah, B. (2023). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *PENDIKDAS; Jurnal Pwndidikan Dalam Situs*, 04(02), 17–26.
- Kastaji, K., Patoni, A., & Maunah, B. (2024). Urgensi Leadership Dan Manajerialship Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(02).
- Kurniati, T., Yusup, I. R., Hermawati, A. S., & Kusumawardani, D. (2021). Respon Guru Terhadap Kendala Proses Pembelajaran Biologi di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(1), 40–46.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v7i1.765>
- Lawrence, L., & Wu, J. (2021). China's higher education governance during COVID: a mixed-methods study of policy analysis and student perspectives. *Asian Education and Development Studies*, 10(2), 295–307.
<https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2020-0115>
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 cap, Permendikbud 2 (2020).
- Mulyani, H., Meirawan, D., & Rahmadani, A. (2020). Increasing school effectiveness through principals' leadership and teachers' teaching performance, is it possible? *Cakrawala Pendidikan*, 39(2), 279–292.
<https://doi.org/10.21831/cp.v39i2.28864>
- Nuryatno, M. A. (2015). Critical Remarks on Educational Philosophy of Paulo Freire. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1), 1–16.
<https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.1542>
- Prasetyono, H., Abdillah, A., Djuhartono, T., Ramdayana, I. P., & Desnaranti, L. (2021). Improvement of teacher's professional competency in strengthening learning methods to maximize curriculum implementation. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 10(2), 720–727.
<https://doi.org/10.11591/ijere.v10i2.21010>
- Sakti, A. (2023). Meningkatkan Pembelajaran Melalui Teknologi Digital. *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)*, 2(2), 212–219.
<https://doi.org/10.55606/juprit.v2i2.2025>
- Santín, M. F., & Torruella, M. F. (2017). Reggio emilia: An essential tool to develop critical thinking in early childhood. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 6(1), 50–56.
<https://doi.org/10.7821/naer.2017.1.207>
-

Saputra, I. G. P. E., Sukariasih, L., & Muchlis, N. F. (2022). Penyusunan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Menggunakan Flip Pdf Profesional Bagi Guru SMA Negeri 1 Tirawuta: Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 5, 1941–1954.

Susilo, M. J., & Dkk. (2022). *Best practice implementasi kurikulum merdeka di kota yogyakarta* (Issue September).

Thohir, M., Ma'arif, S., Junaedi, Huda, H., & Ahmadi. (2021). From disruption to mobilization: Ire teachers' perspectives on independent learning policy. *Cakrawala Pendidikan*, 40(2), 359–373.
<https://doi.org/10.21831/cp.v40i2.39540>

Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 126–136.
<https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>